

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2017). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 menyebutkan bahwa BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (PEMDA), Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BLU) dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan.

Dalam hal pengelolaan keuangan Negara/Daerah perlu ada hal-hal yang harus ditingkatkan yaitu transparansi, kinerja dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah, yang mana hal tersebut didukung oleh pemerintah dengan membuat dan menyusun undang-undang keuangan negara yang tersusun pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, UU nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Irman Suryati 2017). Undang-undang tersebut juga dijadikan pedoman oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan untuk

melakukan pengujian terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kota/Kabupaten) harus membuat serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian pasal 32 menyebutkan bahwa bentuk serta isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) awalnya diatur oleh PP nomor 24 Tahun 2005 yang selanjutnya diatur oleh PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai bentuk perkembangan dari PP sebelumnya. Lalu, tiap kepala daerah juga diharuskan untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD sudah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai (Safitri 2015)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pengertian sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal berperan sangat penting dalam menghasilkan informasi yang dapat diandalkan.

Dengan sistem pengendalian yang baik maka akan terbentuk laporan keuangan yang handal. Semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka akan semakin baik pula opini yang akan didapatkan oleh entitas pemerintah daerah. Namun apabila ditemukan kelemahan atas Sistem Pengendalian Internal dalam pelaporan keuangan pada suatu entitas daerah, maka hal tersebut akan menjadi sebuah temuan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Temuan-temuan tersebut akan digunakan oleh auditor BPK dalam menentukan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengertian opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini ini didasari oleh beberapa kriteria yaitu (i) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan, (iii) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dapat diberikan oleh pemeriksa berdasarkan 4 jenis opini, yaitu opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan opini tidak memberikan pendapat.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki 15 entitas didalamnya dengan rincian 1 provinsi, 2 kota dan 12 kabupaten. Berdasarkan dari hasil audit BPK Provinsi Kalimantan Barat, hampir seluruh entitas menunjukkan peningkatan opini LKPD dari tahun ke tahun. Selain peningkatan opini LKPD, tentu terdapat entitas yang sempat mengalami penurunan dan bahkan ada pula entitas yang tidak mengalami

peningkatan sama sekali dalam setiap tahunnya. Berikut adalah data opini LKPD tahun 2015 – 2019:

Tabel 1.1
Data Opini LKPD Prov. Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

| Pemda | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Prov Kalimantan Barat | WTP | WTP | WTP | WDP | WTP |
| Kota Singkawang | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| Kota Pontianak | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab Sintang | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab Sekadau | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab Sanggau | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab Sambas | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP |
| Kab Mempawah | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab Melawi | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP |
| Kab Landak | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab Kubu Raya | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab Ketapang | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Kab Kayong Utara | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| Kab Kapuas Hulu | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| Kab Bengkayang | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |

(Sumber: LHP LKPD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 – 2019)

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa entitas yang sempat mengalami penurunan opini adalah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018. Menurut (BPK Provinsi Kalimantan Barat 2019) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2018 hal tersebut diperoleh Provinsi Kalimantan Barat karena BPK menemukan adanya temuan kepatuhan yaitu pada pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain hal tersebut, ada pula temuan kepatuhan lainnya yang diperoleh BPK dari Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 yaitu pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan menengah negeri belum tertib, kesalahan penganggaran atas belanja hibah barang kepada masyarakat/pihak ketiga/pemerintah daerah sebesar Rp198.220.000,00 yang diperuntukkan bagi

sekolah negeri, serta pengelolaan retribusi parkir dan rumah singgah pada rumah sakit umum daerah dr. soedarso belum memadai.

Menurut BPK Provinsi Kalimantan Barat dalam LHP LKPD Tahun 2015 – 2019, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Bengkayang menjadi entitas yang tidak mengalami peningkatan opini dalam setiap tahunnya. Tentu ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan di 2 entitas tersebut dinilai tidak baik. Kabupaten Kayong Utara tidak mengalami peningkatan predikat opini karena pada tahun 2015 - 2019 BPK mendapatkan adanya temuan sistem pengendalian internal yaitu pada pengelolaan aset dan aset lainnya pada pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang belum memadai. Kabupaten Bengkayang memiliki beberapa permasalahan terhadap laporan keuangan yang telah dibuatnya. Hal tersebut membuat Kabupaten Bengkayang sama sekali tidak mengalami peningkatan dalam rentan waktu 2015 – 2019. Permasalahan yang ada pada laporan keuangan Kabupaten Bengkayang pada tahun 2015 - 2016 adalah adanya temuan spi yang ditemukan oleh auditor BPK yaitu terkait pengelolaan aset tetap, aset lainnya, hibah bantuan operasional sekolah dan dana bantuan sosial belum memadai. Pada tahun 2017, adanya temuan spi terkait pengelolaan aset tetap dan aset lainnya yang belum memadai dan penganggaran belanja modal sebesar Rp12.090.349.000,00 dan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga sebesar Rp48.830.235.800,00 tidak sesuai ketentuan. Pada tahun 2018 temuan spi yang diperoleh BPK adalah terkait pengelolaan aset tetap yang masih belum memadai. Terakhir, pada tahun 2019 pengelolaan aset tetap masih belum juga memadai dan

adanya uang persediaan tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.327.097.213,00 belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sekretariat daerah.

Pada tahun 2015 dan 2016 terdapat beberapa daerah yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian selain Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Bengkayang yaitu pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang yang mana hal tersebut dikarenakan oleh permasalahan yang hampir sama yaitu adanya temuan SPI terkait dengan pengelolaan aset tetap Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang belum memadai. Pada Tahun 2017, Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang sudah mencapai pada opini terbaik yaitu opini wajar tanpa pengecualian yang mana hal tersebut didapatkan karena pemerintah daerah tersebut menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sambas tetap pada predikat wajar dengan pengecualian dengan permasalahan dan temuan yang masih sama yaitu terkait pengelolaan aset tetap. Hingga akhirnya Kabupaten Sambas mendapatkan predikat terbaiknya yaitu opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 2018 sedangkan Kabupaten Melawi pada tahun 2019 menurut BPK Provinsi Kalimantan Barat dalam LHP LKPD Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2015 hingga 2019 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya selalu terdapat adanya temuan terkait sistem pengendalian internal yaitu pada pengelolaan aset tetap pemerintah kabupaten kubu raya yang belum memadai. Sedangkan untuk temuan kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yaitu terkait dengan

Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan Bangunan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Sebesar Rp410.112.303,42 pada tahun 2015, kelebihan penyeteroran PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan pegawai Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp1.193.472.632,02 pada tahun 2016, penerima dana bantuan sosial dan transfer bantuan keuangan ke desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp4.065.532.000,00 pada tahun 2017, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp9.495.200,00 pada tahun 2018 dan kesalahan penganggaran belanja daerah sebesar Rp12.208.937.978,86 di enam OPD pada tahun 2019 menurut BPK Provinsi Kalimantan Barat dalam LHP LKPD Tahun 2015-2019.

Pada Pemerintah Kabupaten Ketapang terdapat temuan sistem pengendalian internal terkait dengan pengelolaan aset tetap pemerintah kabupaten ketapang belum memadai pada tahun 2015, Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) belum memadai pada tahun 2016, pengelolaan pendapatan atas retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Pemerintah Kabupaten Ketapang belum memadai pada tahun 2017, pengelolaan aset tetap dan aset lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Ketapang belum sepenuhnya memadai pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 pengelolaan kas di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang belum tertib menurut BPK Provinsi Kalimantan Barat dalam LHP LKPD Tahun 2015-2019.

Pada Pemerintah Kabupaten Landak terdapat temuan kepatuhan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan ambulance emergency lengkap tidak

sesuai spesifikasi sebesar Rp179.600.000,00 pada tahun 2015, sembilan penerima hibah belum menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Landak sebesar Rp500.000.000,00 pada tahun 2016, pengenaan pajak atas jasa giro rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Landak tidak sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada tahun 2017, pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan dinas kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa Kabupaten Landak sebesar Rp650.665.500,00 menurut BPK Provinsi Kalimantan Barat dalam LHP LKPD Tahun 2015-2019.

Pada Pemerintah Kota Pontianak terdapat juga temuan terkait sistem pengendalian internal yaitu Pengelolaan aset tetap dan aset tak berwujud pada Pemerintah Kota Pontianak belum tertib pada tahun 2015, Pengelolaan piutang lainnya pada Pemerintah Kota Pontianak tidak memadai dan tergolong macet minimal sebesar Rp7.102.556.957,00 pada tahun 2016, penyajian piutang lainnya sebesar Rp3.858.434.700,00 belum didukung data yang valid pada tahun 2017, terdapat kesalahan penganggaran belanja daerah Pemerintah Kota Pontianak pada tiga OPD pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pontianak belum mengatur kebijakan terkait peningkatan/kapitalisasi aset tak berwujud serta metode amortisasinya menurut BPK Provinsi Kalimantan Barat dalam LHP LKPD Tahun 2015-2019.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada dua entitas

pemerintah daerah yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian yaitu Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Kayong Utara masih rendah yang mana tingkat tindak lanjutnya masih berada dibawah 60%.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Kalimantan Barat Penulis juga mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mempermudah proses penelitian. Bahan referensi tersebut antara lain:

1. Ahmad Faishol (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
2. Amalia Nur Alfiani, Sri Rahayu dan Annisa Nurbaiti (2017) melakukan penelitian dengan judul “Jumlah Temuan Audit Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah temuan audit atas SPI dan kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit LKPD pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015.
3. Darmawati (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan Terhadap Perundang -

Undangan, Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini BPK RI”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berpengaruh negatif signifikan terhadap opini BPK RI.

4. Desi Fatimah, Ria Nelly Sari & M. Rasuli (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPI dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini WTP, Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan Opini WTP dan Umur pemerintah daerah tidak berpengaruh pada penerimaan opini WTP.
5. Dodik Slamet Pujiono, Hari Sukarno & Novi Puspitasari (2016) melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara)”. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara.
6. Ira Gustina (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu”. Hasil dari

penelitian ini adalah bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (kecenderungan kecurangan akuntansi) pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu.

7. Mimi Lientesa Irman dan Suryati (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan Pada Perundang-Undangan, Opini Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2014”. Hasil dari penelitian ini adalah Kelemahan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit, ketidakpatuhan pada perundang-undangan berpengaruh pada penerimaan opini WTP sedangkan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif pada opini WTP dan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh pada opini WTP.
8. Ni Luh Ketut Shanti Antik Safitri & Darsono (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh kelemahan SPI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini WTP sedangkan temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan dan opini tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit.
9. Nur Fitriana, Rita Anugerah & Ruhul Fitrioso (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan dan Dana Insentif Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Tindak Lanjut Rekomendasi

Audit Sebagai Variabel Intervening”. Hasil dari penelitian ini adalah SPI dan kepatuhan berpengaruh negatif terhadap opini LKPD sedangkan dana insentif dan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap opini LKPD, SPI dan kepatuhan berpengaruh negatif terhadap tindak lanjut rekomendasi audit sedangkan dana insentif daerah tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi audit, serta SPI dan dana insentif daerah tidak berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi sedangkan kepatuhan berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi.

10. Oka Purnawan Widodo & Sudarno (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap penentuan opini pemeriksaan BPK atas LKPD.
11. Desiana Anugrah Budiawan & Budi S. Purnomo (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

12. Nuhoni Nalurita (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Terhadap Perundangan-Undangan, dan Karakteristik Daerah Terhadap Kredibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kelemahan SPI berpengaruh negative terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah, Total aset sebagai nilai dari ukuran (size) tidak berpengaruh terhadap penentuan kredibilitas laporan keuangan Pemerintah daerah, Ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah serta Opini tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kredibilitas laporan keuangan dalam penelitian ini diwakili oleh opini BPK.
13. BRM. Suryo Triono & Septiana Novita Dewi (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian tersebut adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi, komunikasi serta pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kegiatan pengendalian berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
14. Dewi Rahmasari (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Total Aset Terhadap Opini Audit

Dengan Tingkat Pengungkapan Pada Catatan Atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Sebagai Variabel Intervening”. Hasil dari penelitian ini adalah SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, total aset berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan serta tingkat pengungkapan tidak berpengaruh terhadap opini audit.

15. Juanda Surya & Suparno (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Peran Masyarakat Madani dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks pembangunan manusia, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat, dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2015.
16. Jumadi Rudiansyah (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera”. Hasil dari penelitian tersebut adalah temuan atas SPI dan temuan atas pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini audit.
17. Maulidya Rahmi, Nita Erika Ariani (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di

Provinsi Aceh”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

18. Tuti Herawati (2014) melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, serta pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan. Lalu terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko, serta informasi & komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dan selanjutnya terdapat pengaruh tidak signifikan antara kegiatan pengendalian dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial.
19. Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

20. Nikita Srisilia Mawuntu, Hendrik Manossoh, Dhullo Afandi (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepatuhan dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan akan peraturan Undang-Undang berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara sedangkan Pengawasan Internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian

| No | Nama, Tahun, Tempat | Persamaan | Perbedaan | Hasil Penelitian | Sumber |
|----|---|--|---|--|---|
| 1. | Ahmad Faishol (2016) | Variabel Independen : Sistem Pengendalian Internal | Variabel Dependen : Kualitas laporan keuangan | Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan | Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume 1 No. 3, Oktober 2016. ISSN 2502-3764 |
| 2. | Amalia Nur Alfiani, Sri Rahayu dan Annisa Nurbaiti (2017) | Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Intern - Kepatuhan Variabel Dependen : - Opini LKPD | Tempat penelitian | Jumlah temuan audit atas SPI dan kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit LKPD pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat tahun 2014-2015. | Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK) Volume 9 No. 1, April 2017, Halaman 12-18. ISSN 2088-5091 |
| 3. | Darmawati (2017) | Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal | Variabel Independen : - Tindak lanjut rekomendasi | Kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan Tindak Lanjut Rekomendasi | Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|
| | | - Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan | hasil pemeriksaan | Hasil Pemeriksaan berpengaruh negatif signifikan terhadap opini | Lampung, Tahun 2017. |
| | | Variabel Dependen : - Opini BPK | - Tempat penelitian | | |
| 4. | Desi Fatimah, Ria Nelly Sari & M. Rasuli (2014) | Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal - Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan | Variabel Independen : - Opini Audit Tahun Sebelumnya - Umur Pemerintah Daerah Variabel Dependen : - Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada LKPD di Seluruh Indonesia | - SPI dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini WTP. - Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan Opini WTP. - Umur pemerintah daerah tidak berpengaruh pada penerimaan opini WTP. | Jurnal Akuntansi Volume 3 No. 1, Oktober 2014. Halaman 1-15. |
| 5. | Dodik Slamet Pujiono, Hari Sukarno & Novi Puspitasari (2016) | Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal | Variabel Dependen : - Pengelolaan Keuangan Daerah - Kinerja Pemerintah Daerah | SPI berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara. | Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 10 No. 1, Januari 2016. Halaman 68 – 81. |
| 6. | Ira Gustina (2018) | Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal | Variabel independen : - Ketaatan Aturan Akuntansi Variabel Dependen: - Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu | SPI dan Ketaatan Aturan Akuntansi memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (kecenderungan kecurangan akuntansi) pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu. | Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7 No.2, Juli – Desember 2018. ISSN 2089-6255 |
| 7. | Mimelientesa Irman dan Suryati (2017) | Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal | Variabel Independen : - Opini Audit Tahun Sebelumnya | - Kelemahan SPI dinilai berpengaruh negative terhadap penerimaan opini Audit, Ketidakpatuhan pada | KURS Vol. 2 No. 2, Desember 2017. e-ISSN 2527-8215 |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|
| | | - Ketidakpatuhan pada perundang-undangan | - Umur Pemerintah Daerah | Perundang-undangan berpengaruh pada penerimaan opini WTP. | |
| | | | Variabel Dependen : - Opini Audit di Kabupaten / Kota Provinsi Riau Tahun 2011 - 2014 | - Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif pada opini WTP dan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh pada opini WTP. | |
| 8. | Ni Luh Ketut Shanti Antik Safitri & Darsono (2015) | Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal - Temuan Kepatuhan Variabel Dependen : - Opini Audit pada Pemda | Tempat Penelitian | - Pengaruh kelemahan SPI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini WTP - Temuan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan dan opini tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit. | Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2015, Halaman 1-12. ISSN (Online): 2337-3806 |
| 9. | Nur Fitriana, Rita Anugerah & Ruhul Fitrioso (2020) | Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal - Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan Variabel Dependen : - Opini LKPD | Variabel intervening : -Tindak lanjut rekomendasi audit | - SPI dan kepatuhan berpengaruh negatif terhadap opini LKPD sedangkan dana insentif dan tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh positif terhadap opini LKPD - SPI dan kepatuhan berpengaruh negatif terhadap tindak lanjut rekomendasi audit sedangkan dana insentif daerah tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut rekomendasi audit - SPI dan dana insentif daerah tidak berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi sedangkan kepatuhan berpengaruh terhadap opini LKPD melalui tindak lanjut rekomendasi | Jurnal Akuntansi, Volume 8, Nomor 2, April 2020. Halaman 123 – 135. ISSN 2337-4314 |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---|---|
| 10. | Oka Purnawan Widodo & Sudarno (2017) | Variabel Independen : - Temuan Kelemahan SPI - Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan Variabel Dependen : - Opini BPK atas LKPD | - Metodologi Penelitian - Tempat penelitian | Temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap penentuan opini pemeriksaan BPK atas LKPD. | Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017, Halaman 1 – 9. ISSN (Online) : 2337 – 3806 |
| 11. | Desiana Anugrah Budiawan & Budi S. Purnomo (2014) | Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal | Variabel independen : - Kekuatan Koersif Variabel Dependen : - Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | - Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah - Kekuatan koersif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 2, Nomor 1 , Tahun 2014. ISSN 276 – 288 |
| 12. | Nuhoni Nalurita (2015) | Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal - Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan | Variabel Independen : - Karakteristik Daerah Variabel Dependen : - Kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia | - Kelemahan SPI berpengaruh negative terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah - Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah. - Ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah - Opini tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah | Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Tahun 2015 |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|
| 13. | BRM. Suryo Triono & Septiana Novita Dewi (2020) | Variabel Independen : - Sistem Pengendalian Internal | Variabel Dependen : - Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | - Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Kegiatan Pengendalian berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. | Jurnal Akuntansi dan Pajak, Volume 21. Nomor 1, Tahun 2020. ISSN 213 – 220 |
| 14. | Dewi Rahmasari (2017) | Variabel Independen : - SPI - Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan Variabel Dependen : - Opini Audit | Variabel independen : - Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan - Total Aset Variabel Intervening : - Tingkat Pengungkapan pada CALK Kementerian / Lembaga | -SPI dan kepatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pada laporan keuangan -Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan -Total Aset berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan -Tingkat pengungkapan tidak berpengaruh terhadap opini audit | Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Tahun 2017. |
| 15. | Juanda Surya & Suparno (2019) | Variabel Independen : - SPI Variabel Dependen : - Opini Audit | Variabel Independen : - Peran masyarakat madani | Indeks pembangunan manusia, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat, dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2015. | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 4, No. 2, (2019) Halaman 259-269. E-ISSN 2581-1002 |
| 16. | Jumadi Radiansyah (2017) | Variabel Dependen : - Opini Audit | Variabel Independen : - Jumlah Temuan Audit | Temuan atas SPI dan pemeriksaan kepatuhan terhadap | Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| | | | | peraturan perundang-undangan berpengaruh negative terhadap opini audit. | Universitas Lampung, Tahun 2017. |
| 17. | Maulidya Rahmi, Nita Erika Ariani (2020) | Variabel Dependen : - Opini Atas LKPD | Variabel Independen : - Temuan Audit - Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | Temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negative terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 5, No. 4, November 2020; Halaman 497-505. E-ISSN 2581-100 |
| 18. | Tuti Herawati (2014) | Variabel Independen : - SPI | Variabel Dependen : - Kualitas Laporan Keuangan | - Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan - Secara parsial, Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. - Secara parsial, Terdapat pengaruh tidak signifikan antara Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. | STAR – Study & Accounting Research, Vol XI, No. 1 – 2014. ISSN : 1693-4482 |
| 19. | Novtania Mokoginta , Linda Lambey , Winston Pontoh (2017) | Variabel Independen : - SPI | Variabel Independen : - Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel Dependen : | - Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah - Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 874-890 |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|---|---|--|
| | | | - Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah | berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. | |
| 20. | Nikita Srisilia Mawuntu , Hendrik Manossoh , Dhullo Afandi (2020) | Variabel Independen : - Kepatuhan | Variabel Independen : - Pengawasan Variabel Dependen : - Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | - Kepatuhan akan peraturan Undang-Undang berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. - Pengawasan Internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. | Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 15(2), 2020, 260-268 |

Nanda Subhan Liandi (2021)

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten Di Kalimantan Barat Tahun 2021)

Variabel yang digunakan yaitu X1 Sistem Pengendalian Internal, X2 Kepatuhan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai variabel independen dan Y Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi, Kota & Kabupaten Di Kalimantan Barat Tahun 2021.

2. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara parsial terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi, Kota & Kabupaten Di Kalimantan Barat Tahun 2021.
3. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara simultan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi, Kota & Kabupaten Di Kalimantan Barat Tahun 2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi, Kota & Kabupaten Di Kalimantan Barat Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara parsial terhadap opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi, Kota & Kabupaten Di Kalimantan Barat Tahun 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem pengendalian internal dan Kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara simultan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi, Kota & Kabupaten Di Kalimantan Barat Tahun 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai masalah yang diteliti serta mendapatkan pengalaman yang berharga dari penelitian ini.

2. Bagi Lembaga Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi sertamasukan bagi akademisi dan peneliti yang akan datang untuk membahas topik penelitian yang serupa dan diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi kegiatan perkuliahan dan dapat dijadikan sebagai pembendaharaan di perpustakaan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan perbandingan untuk penelitian di masa yang akan datang dan memberikan informasi untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut serta perluasan ilmu pengetahuan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah di Kalimantan Barat pada instansi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dengan melakukan penelitian secara langsung berdasarkan data primer yang diperoleh dari auditor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis dimulai dari bulan April 2021 hingga bulan Januari 2022. Untuk lebih jelasnya, penulis menyajikan matriks dan waktu penelitian pada lampiran I.